

**ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

NURIN HIDAYATI

B200120248

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**“ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA
MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TENGAH”**

Yang ditulis oleh:

NURIN HIDAYATI

B200120248

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 18 Februari 2016

Pembimbing

(Drs. Atwal Arifin, M.Si, Ak)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**ANALISIS PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP
ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

NURIN HIDAYATI

B200120248

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : nurinhi.nh@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy is to create independence in improving welfare and public services. One local government efforts to improve the welfare of local communities is to provide capital expenditure is higher for development of sectors which are useful in their respective regions. The purpose of this study was to analyze the effect of revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) in Capex, as well as the effect of PAD, DAU and DAK with moderating economic growth in Capex in the District / city of Central Java province.

This study used a population of 35 District and City of Central Java from year 2012 to 2014 with a purposive sampling techniques appropriate predefined criteria. The number of samples collected as many as 105. The collected data were analyzed using data analysis conducted prior classic assumption test before hypothesis test. Testing the hypothesis in this study using analytical techniques Moderated Regression Analysis (MRA) with f test, R^2 test and t test.

These results indicate that the PAD and Economic Growth no significant effect on Capital Expenditure, DAU significant effect on Capital Expenditure by the intensity and the opposite direction, DAK positive and significant impact on Capital Expenditure. Moderating variables (economic growth) able to moderate variable DAU and DAK able to moderate variable intensity and opposite direction but is not able to moderate PAD variables on capital expenditure.

Keywords: *PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth, Capital Expenditure.*

ABSTRAKSI

Pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah adalah memberikan alokasi belanja modal yang lebih tinggi guna pembangunan sektor-sektor yang bermanfaat pada masing-masing daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Belanja Modal, serta pengaruh PAD, DAU, dan DAK dengan moderasi Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi se Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan populasi 35 daerah Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah dari tahun 2012-2014 dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* sesuai kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 105. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan uji f , uji r^2 dan uji t .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel moderasi (Pertumbuhan Ekonomi) mampu memoderasi variabel DAU, dan mampu memoderasi variabel DAK dengan intensitas dan arah yang berlawanan namun tidak mampu memoderasi variabel PAD pada belanja modal.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. UU No.32 tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan mengacu asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah (Dodik, 2012).

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012). Belanja Modal didanai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satu asal pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga

terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan antara PAD dengan Belanja Modal

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD-nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

Jaya dan Dwirandra (2012) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin

meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Hubungan antara DAU dengan Belanja Modal

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Hasil dari penelitian dari Oktora dan Pontoh (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Prakosa (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan meningkat.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Hubungan antara DAK dengan Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004). Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2013) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan beberapa penelitian ini maka mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Hubungan PAD terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Salah satu sumber dana bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah adalah PAD. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiathi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal. Maka dari itu untuk meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah daerah membutuhkan pasokan dari PAD yang lebih tinggi juga.

H4 :Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi akan memperkuat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Hubungan DAU terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah daerah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan cara meningkatkan belanja modal. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang lebih untuk meningkatkan alokasi belanja modal tersebut. Salah satu sumber dana tersebut adalah DAU, DAU merupakan dana yang bersumber dari

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada belanja modal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

H5 :Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi akan memperkuat pengaruh positif Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Hubungan DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber dana dan belanja modal. Karena pemerintah akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satu sumber dana yang didapat oleh pemerintah daerah adalah DAK. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung

akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

H6 :Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi akan memperkuat pengaruh positif Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 35 daerah Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah.Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2012, 73).Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan “penilaian” (*judgment*) peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. Adapun karakteristiknya yaitu:

1. Menyampaikan laporan publikasi tahun 2012-2014.
2. Tersedianya data yang lengkap selama periode pengamatan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan 3 jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi.Variabel dependen, adalah Belanja Modal (BM). Sedangkan variabel independennya terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) . Dan variabel moderasinya adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Definisi operasional variabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Indikator variabel belanja modal antara lain : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya (Yovita 2011).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Indikator PAD antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan daerah yang sah (Yovita 2011).

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB (Bapenas, 2003 dalam Harianto dan Adi, 2007).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Pengujian Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas:

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	58793,78921903
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,096
	Negative	-,051
Kolmogorov-Smirnov Z		,981
Asymp. Sig. (2-tailed)		,291

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji K-S pada tabel 1 di atas terlihat besarnya nilai K-S adalah 0,981 dan signifikansinya adalah $0,291 > 5\%$ ($\alpha = 0,05$). Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PAD	,709	1,411
DAU	,360	2,780
DAK	,405	2,469
PE	,890	1,123

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Nilai VIF untuk variabel PAD, DAU, DAK dan PE masing-masing adalah 1,411, 2,780, 2,469 dan 1,123 sedangkan *Tolerance*-nya masing-masing adalah 0,709, 0,360, 0,405 dan 0,890. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10, ini berarti data dalam penelitian ini bebas gejala multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,833 ^a	,694	,682	59958,136	1,955

a. Predictors: (Constant), PE, PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS

Hasil uji Autokorelasi pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* adalah 1,955, dengan jumlah unit analisis 105, jumlah variabel bebas 4 nilai $dL = 1,6038$ dan $dU = 1,7617$. Karena DW terletak antara dU dan $(4-dU) = 1,7617 < 1,955 < 2,2383$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data penelitian yang diuji.

Tabel 4 Hasil Uji Glesjer

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	186522,182	83452,891		2,235	,028
PAD	,426	,322	1,406	1,323	,189
DAU	-,239	,207	-1,492	-1,156	,251
DAK	,405	2,100	,236	,193	,847
PE	-2880568,802	1562895,703	-,760	-1,843	,068
PAD*PE	-6,233	5,565	-1,234	-1,120	,265
DAU*PE	4,645	3,761	1,699	1,235	,220
DAK*PE	-9,987	38,727	-,312	-,258	,797

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Output SPSS

Tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji F dan Koefisien Determinasi

Tabel 5 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	851574938979,875	7	121653562711,411	36,539	,000 ^b
Residual	322957521455,783	97	3329458984,080		
Total	1174532460435,65	104			
	8				

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), moderat3, PAD, PE, DAU, DAK, moderat1, moderat2

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan variabel PAD, DAU, DAK, pertumbuhan ekonomi, dan pemoderasi berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu belanja modal.

Uji Koefisien Determinasi *Goodness of fit test* (R^2)

Tabel 6 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,851 ^a	,725	,705	57701,464

a. Predictors: (Constant), moderat3, PAD, PE, DAU, DAK, moderat1, moderat2

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS

Tabel 6 menunjukkan nilai $\text{adjusted}R^2$ sebesar 0,705 yang memiliki arti bahwa 70,5% perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, pertumbuhan ekonomi, dan pemoderasi. Sedangkan sisanya 29,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian terhadap pengaruh parsial dan pengaruh moderasi disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 7 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	294075,028	143277,534		2,052	,043
PAD	,435	,554	,466	,787	,433
DAU	-,740	,355	-1,500	-2,087	,040
DAK	8,284	3,605	1,566	2,298	,024
PE	-5326680,332	2683284,404	-,456	-1,985	,050
PAD*PE	2,709	9,554	,174	,284	,777
DAU*PE	16,491	6,458	1,956	2,554	,012
DAK*PE	-146,521	66,489	-1,485	-2,204	,030

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS

Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 7 sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil uji moderasi untuk H1 diperoleh hasil t-hitung sebesar 0,787 dengan signifikansi sebesar 0,433. Nilai signifikan untuk variabel PAD menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $0,787 < t\text{-tabel}$ sebesar 1,987 yang artinya bahwa H1 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.
2. Hasil uji moderasi untuk H2 diperoleh hasil t-hitung sebesar -2,087 dengan signifikansi sebesar 0,040. Nilai signifikan untuk variabel DAU

menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-2,087 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,987 yang artinya bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, sehingga H2 ditolak.

3. Hasil uji moderasi untuk H3 diperoleh hasil t-hitung sebesar 2,298 dengan signifikansi sebesar 0,024. Nilai signifikan untuk variabel DAK menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $2,298 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,987 yang artinya bahwa H3 diterima sehingga terdapat pengaruh yang positif DAK terhadap Belanja Modal.
4. Hasil uji moderasi untuk H4 diperoleh hasil t-hitung sebesar 0,284 dengan signifikansi sebesar 0,777. Nilai signifikan untuk variabel PAD*PE menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $0,284 < t\text{-tabel}$ sebesar 1,987 yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan PAD pada belanja modal, sehingga H4 ditolak.
5. Hasil uji moderasi untuk H5 diperoleh hasil t-hitung sebesar 2,554 dengan signifikansi sebesar 0,012. Nilai signifikan untuk variabel DAU*PE menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $2,554 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,987 yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan dapat memoderasi hubungan DAU pada belanja modal, sehingga H5 diterima.

6. Hasil uji moderasi untuk H6 diperoleh hasil t-hitung sebesar -2,204 dengan signifikansi sebesar 0,030. Nilai signifikan untuk variabel DAK*PE menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t-hitung $-2,204 > t\text{-tabel}$ sebesar 1,987 yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAK pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, sehingga H6 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, yang berarti H1 ditolak. Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Selain itu, peningkatan anggaran belanja modal tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini menyatakan bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar.

Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014), Verawaty Merina dan Sari (2015) yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda. Dengan berbagai pemaparan

diatas dapat disimpulkan bahwa PAD tidak dapat dijadikan indikator dalam menentukan pengalokasian belanja modal.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, yang berarti H2 ditolak. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan arah negatif. Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini dimana DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarthi dan Supadmi (2014) yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat. Dari berbagi pemaparan diatas dapat disimpulkan jika DAU semakin meningkat maka alokasi belanja modal semakin rendah.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal, yang berarti H3 diterima. Hasil ini

menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan DAK. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty Merina dan Sari (2015), yaitu DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda. Dari berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Hubungan antara PAD terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan PAD pada alokasi belanja modal, yang berarti H4 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi positif terhadap pengalokasian belanja modal

yang kemudian berdampak pada hubungan PAD terhadap pengalokasian belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memiliki kontribusi terhadap pengalokasian belanja modal tidak dapat mempengaruhi hubungan PAD dan belanja modal.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty Merina dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan PAD terhadap alokasi belanja modal. Namun hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sugiardi dan Supadmi (2014) serta Jaya dan Dwirandra (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan pengalokasian belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Dari berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi terhadap pengalokasian belanja modal sehingga tidak dapat mempengaruhi hubungan PAD dan belanja modal.

Hubungan antara DAU terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAU pada alokasi belanja modal, yang berarti H5 diterima. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka daerah tersebut terpacu untuk lebih meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan melalui belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiathi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada belanja modal dengan dengan intensitas dan arah yang berlawanan, memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Dana Alokasi Umum pada belanja modal semakin menurun. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty Merina dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi hubungan antara DAU dengan pengalokasian belanja modal. Dari berbagai pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh Dana Alokasi Umum pada belanja modal semakin meningkat.

Hubungan antara DAK terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan DAK pada belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, yang berarti H6 ditolak. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan sarana prasarana, fasilitas serta infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan DAK tersebut untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional lainnya selain belanja modal. Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memperlemah pengaruh antara DAK pada belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh DAK pada belanja modal semakin menurun.

PENUTUP

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal sehingga H1 ditolak.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan sehingga H2 ditolak.
3. Terdapat pengaruh yang positif Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal sehingga H3 diterima.

4. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Belanja Modal sehingga H4 ditolak.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal sehingga H5 diterima.
6. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Belanja Modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan sehingga H6 ditolak.

Keterbatasan Penelitian

1. Objek penelitian terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sehingga kesimpulan yang diperoleh belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di seluruh Indonesia.
2. Periode penelitian hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2012-2014.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil komponen APBD yaitu PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian Provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode tahunnya dan sesuai dengan tahun terbaru agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain terkait komponen APBD yang belum dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan model penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach*. MRG@UQ Discussion Paper, School of Economics, University of Queensland.

Faridi, Muhammad Zahir. 2011. *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan*. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* Vol. 31, No. 1 (June 2011), pp. 1-13

Gujarati, Damodar N., & Porter, Dawn C. 2009. *Dasar-dasar ekonometrika (basic econometrics, 5th ed.)* (Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangungsong, penerjemah). Salemba Empat, Jakarta.

Guritno Mangkusoebroto, 1993. *Ekonomi Publik*, PBFU UOM, Yogyakarta.

Halim, Abdul, (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.

Harianto, David dan Priyo Hadi Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar, 26-28 Juli 2007.

Hasan, T.I.B. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*, 1(1).

<http://www.bps.go.id>.

<http://www.djpk.depkeu.go.id>.

Jaya, Dwirandra. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):79-92. Bali.

Khusaini, Muhammad, (2006), *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang : BPFE Unbraw.

Kusnandar,. Dodik Siswanto. (2012). “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal”.*Paper disajikan pada Seminar Nasional Akuntansi ke XV di Banjarmasin Tahun 2012.*

Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah).*Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Maharani, Mayzestika. 2010. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah se Jawa Tengah”. *Skripsi.* Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Prakosa, Kesit Bambang, 2004. “Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY”. *JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118.*

Santosa, Budi. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan kemiskinan 33 provinsi di Indonesia.* Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol 5, No. 2. Jakarta.

Sekaran, Uman, *Research Method for Business : A skill Building Approach*, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002.

Sharma, Basudev. 2012. *Government expenditure and economic growth in Nepal: a minute analysis. Journal of Business Management and Accounts ISSN 2315-6899 Vol. 1(4) pp. 37-40 October 2012.*

Sianipar, Eva Septriani. 2011. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara”. *Skripsi.* Universitas Sumatera Utara.

Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.* Makalah disampaikan dalam rangka Orasi Ilmiah. Bandung, 10 April 2002.

Sugiarthi, Supadmi. 2014. *Pengaruh PAD, DAU dan SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477-495. Bali.

Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Bisnis*.Bandung Alfabeta.

Sukirno, Sadono, 2003, Makroekonomi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang No. 32 Tahun (2004) *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No. 33 Tahun (2004) *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Verawaty, Citra, I.M, Mela Sari. 2015. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.*Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, Medan, 16-19 September 2015.

Yovita, Farah Marta. 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)”. *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. Semarang: UNDIP.